

DOSEN MUDA



LAPORAN AKHIR

MODEL MANAJEMEN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG

| | |
|------------------|-----------------------------|
| UPT-PUSTAK-UNDIP | |
| No. Daft: | 630/KI/ 1000 /C1 |
| Tgl. | 18-5-06 |

Peneliti

**Drs. Fathurrohman, M.Si
Dra. Ida Hayu Dwimawanti, MM**

=====

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
Nomor: 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005 tanggal 11 April 2005

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2005**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | a. Judul Penelitian | Model Manajemen Kerjasama Perguruan Tinggi Dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang |
| | b. Bidang Ilmu | Sosial |
| | c. Kategori Penelitian | Pengembangan Ilmu Sosial |
| 2. | Ketua Peneliti | |
| | a. Nama | Drs. Fathurrohman, M.Si |
| | b. Jenis Kelamin | Laki-laki |
| | c. Golongan/Pangkat | III C |
| | d. Jabatan Fungsional | Lektor |
| | e. Jabatan Struktural | - |
| | f. Fakultas | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| | g. Perguruan Tinggi | Universitas Diponegoro |
| | h. Bidang Keahlian | Administrasi Negara |
| 3. | Nama Anggota Peneliti | Dra. Ida Hayu Dwimawanti, MM |
| 4. | Lokasi Penelitian | Kota Semarang |
| 5. | Lama Penelitian | 8 bulan |
| 6. | Biaya Penelitian | Rp. 5.000.000,00 (LimaJuta Rupiah) |
| 7. | Dibiayai Melalui Proyek | Dosen Muda Tahun 2005 |

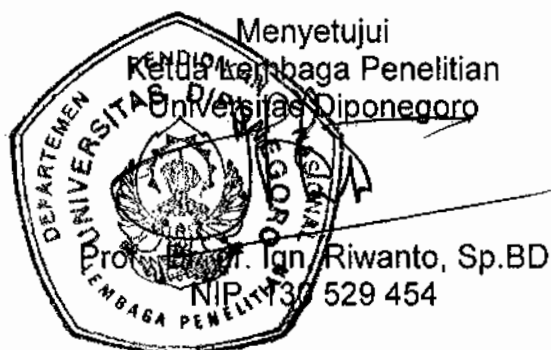
Semarang, Nopember, 2005



Ketua Peneliti,

Fathurrohman

Drs. Fathurrohman, M.Si
NIP. 131 681 416



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah, SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga laporan kegiatan penelitian tentang "MODEL MANAJEMEN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG" dapat terselesaikan. Kepada Dikti, dan Lemlit Undip, dan pihak-pihak yang telah membantu, kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih obyektif terhadap kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Lembaga Perguruan Tinggi. Selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder/ laporan yang relevan.

Diakui bahwa kajian ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan laporan ini.

Semarang, Nopember 2005

Fathurrohman, dkk

RINGKASAN

MODEL MANAJEMEN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG, Fathurrohman, Ida Hayu, 2005, 57 Halaman

Masalah penelitian difokuskan pada bidang manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan) kerjasama antara Lembaga Perguruan Tinggi di Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang yang saat ini berlangsung serta hambatan/kendala yang muncul dalam proses kerjasama tersebut.

Kajian analisis teoritis permasalahan kerjasama antara pihak Pemerintah Kota Semarang dengan beberapa Perguruan Tinggi menggunakan teori Cheema dan Hosaka (1986) dilihat dari fungsi manajemen terutama terhadap fungsi manajemen dan teori kebijakan dari Grindel (1980) yang menyoroti pada variabel-variabel keberhasilan sebuah kebijakan/program kerjasama antar lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipologi kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Lembaga Perguruan Tinggi sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat yang optimal. Melalui penelitian ini diharapkan pihak Pemda maupun Perguruan Tinggi dapat menyempurnakan kebijakan kerjasama berdasarkan kepentingan masing-masing pihak dan perkembangan serta perubahan lingkungan.

Penelitian kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Perguruan Tinggi di wilayah Administratif Kota Semarang menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan fenomena kerjasama dan permasalahan yang timbul diantara kedua belah pihak. Sampel penelitian Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas

Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Khatolik Soegijapranata yang diambil secara sengaja (*purposive*). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan evaluasi pakar "*Expert Analysis*" dari Rossi (1984).

Hasil penelitian diketahui bahwa model kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan Lembaga Perguruan Tinggi menganut 3 asas kewenangan yaitu: (1) Desentralisasi Penuh, (2) Desentralisasi Sentralisasi dan (3) Sentralisasi Penuh yang selanjutnya di dalam praktek kerjasama terbagi dalam 5 model meliputi: (1) Desentralisasi Penuh, (2) Desentralisasi dan Desentralisasi Fungsi Pengawasan, (3) Sentralisasi Perencanaan dan Pengawasan, (4) Sentralisasi Perencanaan, (5) Sentralisasi Fungsi Secara Penuh.

Hambatan utama kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi terletak pada aspek normatif dan budaya kerja pada masing-masing lembaga. Karena perbedaan lingkungan kerja (iklim kerja). Guna menanggulangi hambatan tersebut perlu adanya forum/jaringan kerjasama Pemda – Perguruan Tinggi yang bersifat otonom dan handal.

SUMMARY

COOPERATION MANAGEMENT MODEL BETWEEN UNIVERSITY AND MUNICIPALITY OF SEMARANG CITY, Faturrohman, Ida Hayu, 2005, 57 Pages

Research subject is focused on functions of cooperation management (planning, organizing, encouraging, and controlling) between university boards in Semarang city and municipality of Semarang city and on problems arising in the cooperation process.

Theoretical and analytical study on the cooperation between municipality of Semarang city and several universities uses theory of Cheema and Hosaka (1986) viewed from a function of management mainly toward coordinative function and policy theory of Grindel (1980) that focuses on success variables of a policy/ cooperation program among boards.

The research aims to describe typology of cooperation between municipality of Semarang city and universities so that both parties can get the optimal benefit. From the research it is hoped that municipality and universities will be able to refine the cooperation policy based on importance of each party, development, and environmental transformation.

The research on cooperation between municipality of Semarang city and universities in administrative area of Semarang city uses qualitative approach describing phenomena of cooperation and the problems arising from both sides. Research samples are Diponegoro University, Sultan Agung Islamic University, Soegijapranata Catholic University taken purposively. Data collecting techniques are documentation and interview. Data analysis uses expert analysis of Rossi (1984).

Research results show that cooperation model between municipality of Semarang city and universities is based on 3 authoritative principles: (1) total decentralization, (2) decentralization – centralization, and (3) total centralization that thus in the cooperation practices divided into 5 models namely: (1) total decentralization, (2) decentralization and centralization of controlling function, (3) centralization of planning and controlling, (4) planning centralization, (5) total centralization of function.

The main problem of cooperation between municipality and university is in the normative aspect and working behavior in each board. It is due to the difference of working condition. To overcome the problem, it needs to form an autonomic and top forum/ network of cooperation between municipality and universities.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah, SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga laporan kegiatan penelitian tentang "MODEL MANAJEMEN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG" dapat terselesaikan. Kepada Dikti, dan Lemlit Undip, dan pihak-pihak yang telah membantu, kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih obyektif terhadap kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Lembaga Perguruan Tinggi.

Diakui bahwa kajian ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan laporan ini.

Semarang, Nopember 2005

Fathurrohman, dkk

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| RINGKASAN | iii |
| SUMMIARY | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 2 |
| BAB II TINJAUAN PUSATAKA | 4 |
| A. Tipe Manfaat | 6 |
| B. Visi | 8 |
| C. Kemampuan dan Potensi | 9 |
| D. Manajemen Kerjasama Pemerintah Kota Semarang- Lembaga Perguruan Tinggi | 11 |
| BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 14 |
| A. Tujuan Penelitian | 14 |
| B. Kontribusi Penelitian | 14 |
| BAB IV METODE PENELITIAN | 16 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 18 |
| A. Karakteristik Kerjasama Universitas-Pemerintah Kota Semarang | 18 |
| A.1. Universitas Diponegoro Semarang | 19 |
| A.2. Universitas Islam Sultan Agung | 22 |
| A.3. Universitas Khatolik Soegijapranata | 24 |
| B. Manajemen Kerjasama | 26 |
| B.1. Universitas Diponegoro Semarang | 26 |
| B.2. Universitas Islam Sultan Agung | 32 |
| B.3. Universitas Khatolik Soegijapranata | 38 |
| C. Model Kerjasama Universitas Dengan Pemerintah Kota Semarang | 43 |

| | |
|--|-----------|
| D. Model Manajemen Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan Universitas | 50 |
| D.1. Tahap Perencanaan | 50 |
| D.2. Tahap Pengorganisasian | 51 |
| D.3. Tahap Penggerakan | 52 |
| D.4. Tahap Pengawasan | 53 |
| BAB VI PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| A.1. Metode Pengadaan | 55 |
| A.2. Bidang Kerjasama | 55 |
| A.3. Bentuk Kerjasama | 55 |
| A.4. Norma | 55 |
| A.5. Budaya | 56 |
| A.6. Sarana dan Inovasi LPT | 56 |
| A.7. Wilayah Kerjasama LPT-Pemerintah Kota Semarang | 57 |
| A.8. Hambatan Kerjasama LPT-Pemerintah Kota Semarang | 57 |
| B. Rekomendasi | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Tabel IV.1. | Indikator Penelitian | 17 |
| Tabel V.1. | Bidang Kerjasama Lembaga Pendidikan Tinggi dengan Pemerintah Daerah | 18 |
| Tabel V.2. | Bentuk Kerjasama Lembaga Pendidikan Tinggi dengan Pemerintah Daerah | 19 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 membawa pengaruh terhadap kewenangan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 7, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kewenangan bidang lain.

Kewenangan Pusat yang telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 UU 22 tahun 1999 meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Filosofi otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi, Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Pelimpahan kewenangan, tugas dan tanggung jawab dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan kerja, meningkatkan kemampuan dan dukungan daerah dalam menunjang pembangunan nasional

Salah satu delegasi kewenangan yang penting untuk dikaji adalah adalah bidang pendidikan, khususnya pendidikan Perguruan Tinggi, hal ini mengingat peran dan fungsi Perguruan Tinggi bagi pembangunan daerah. Pada sisi lain Lembaga Perguruan Tinggi (LPT) mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri

dari: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga (*institutional capacity building*), sumber daya manusia, perumusan kebijakan publik (*public policy*), revitalisasi fungsi DPRD, pengawasan publik, konservasi dan pendayagunaan sumber daya alam dan seterusnya merupakan sebagian dari tema dalam lingkup Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan sebagai wilayah kegiatan LPT, baik dalam konteks pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Hasil implementasi Pasal 11 UU Nomor 22 tahun 1999 di bidang pendidikan, khususnya kerjasama antara Lembaga Perguruan Tinggi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, secara jelas, rinci dan menyeluruh belum diketahui hasilnya, sehingga diperlukan kajian berkenaan dengan model manajemen kerjasama diantara kedua lembaga tersebut.

Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kota Semarang dipandang memiliki arti penting dan strategis dalam manajemen pembangunan daerah, karena keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan, sehingga antara kedua lembaga tersebut dapat saling melengkapi dan terjadi hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan (*simbiosis mutualis*).

B. PERUMUSAN MASALAH

Perguruan Tinggi memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat yang sangat erat dengan fungsi Pemerintahan daerah yaitu: Anggaran, Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan. Kedua Lembaga tersebut pada kenyataannya memiliki keunggulan dan kelemahan sehingga diperlukan manajemen kerjasama yang sinergis.

Agar fokus permasalahan yang akan diteliti lebih cermat, maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagimanakah manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan) kerjasama antara Lembaga Perguruan Tinggi di Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang Kota Semarang yang saat ini berlangsung?
2. Hambatan apakah dalam manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan) kerjasama antara Lembaga Perguruan Tinggi di Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang Kota Semarang
3. Bagimanakah model manajemen kerjasama (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan) antara Lembaga Perguruan Tinggi di Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang Kota Semarang yang efektif?